

BAB III

PERAN SRI PADUKA PAKU ALAM VIII DALAM AGRESI MILITER BELANDA II DI YOGYAKARTA

A. Kehidupan Sri Paku Alam VIII

Sri Paku Alam VIII yang lahir pada Minggu Pon 29 Mulud tahun BE 1840 atau bersamaan dengan 10 April 1910 dengan nama kecil Bendoro Raden Mas Haryo Sularso Kunto Suratno (Kanjeng Pangeran Haryo Suryosuloso). Beliau merupakan putra dari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam VII dengan Permaisuri Gusti Bendara Raden Ayu Retno Puwoso. Beliau lahir di Praja Paku Alaman, yang kelak akan menjadi *Manggalaning* Praja Paku Alaman dengan gelar Pangeran Haryo.

Beliau tumbuh dan besar di Puro Paku Alaman, dan memiliki nama dewasa sebagai Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Prabu Suryodilogo yang di berikan oleh ayahanda nya pada Jumat Pahing 17 Jumadilawal 1867 atatu 4 September 1936, saat usia beliau 26 tahun. Pendidikan yang ditempuh beliau adalah *Europesche Lagere School*¹ Yogyakarta, *Christelijk MULO* Yogyakarta, *AMS B* Yogyakarta, *Rechts Hoogeschool* (sampai *candidaat*).

Kecintaanya pada rakyat semakin kuat saat mulai dewasa, ketika beliau baru genap 2 tahun menuntut ilmu di *Recths HoogeSchool* di Jakarta, Sri Paku Alam VIII dipanggil oleh ayahandanya untuk pulang ke Yogyakarta dan diminta membantu pekerjaan dibidang pertanahan. Tetapi Sri Paku Alam

¹ *Europesche Lagere School* adalah singkatan dari bahasa Belanda: *Europeesche Lagere School*) Sekolah Dasar pada zaman kolonial Belanda di Indonesia.dan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantarnya.

VIII memilih untuk bekerja di bidang Agraria, alasannya adalah supaya dapat bertatap muka dengan rakyat. Dengan pekerjaan itu Sri Paku Alam VIII dapat mendidik lurah-lurah dan carik-carik yang saat itu masih buta huruf.

Ketika usia beliau baru 27 tahun beliau sudah harus meninggalkan bangku kuliah *Rechts hogeschool* di Batavia. Pada *senin Pahing 30 Suro 1868* (12 April 1937), beliau naik tahta dan dinobatkan sebagai Paku Alam VIII menggantikan ayahanda nya Paku Alam VII yang wafat pada tahun itu juga.

Sebelum beliau naik tahta dan dinobatkan sebagai KGPAA Paku Alam VIII untuk menggantikan ayahandanya. Sejak kecil beliau sudah dididik untuk kelak menjadi pemimpin. Pada 12 April 1937 beliau ditahtakan sebagai Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Prabu Suryodilogo menggantikan mendiang ayahnya. Setelah kedatangan Bala Tentara Jepang di tahun 1942 beliau mulai menggunakan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Paku Alam VIII.

Pada 12 April Tahun 1937, beliau naik tahta dan menggantikan ayahanda dengan nama KGPAA Prabu Suryodilogo, dan selanjutnya menjadi KGPAA Paku Alam VIII. Pada waktu kepemimpinannya, Kadipaten Pakualam bergabung dengan Kasultanan Yogyakarta(1942) dan berkantor bersama di Kepatihan Yogyakarta. Dengan kebijaksanaan beliau telah membawa rakyat Paku Alaman dengan selamat dan terhormat dapat melalui

gejolak tiga zaman dan menempatkan beliau sebagai eksponen yang tidak dapat diabaikan dalam khazanah Republik Indonesia.²

Kadipaten Paku Alaman yang didirikan pada tanggal 17 Maret 1813, Status kerajaan ini mirip dengan status Praja Mangkunagaran di Surakarta. Paku Alaman juga dilengkapi dengan sebuah legiun tetapi tidak pernah menjadi legiun tempur yang besar karena selanjutnya hanya berfungsi sebagai seremonial dan pengawal pejabat Kadipaten. Dikalangan kadipaten Pakualaman tidak ada yang idak mengenal Sri Paku Alam VIII, beliau terkenal sebagai seorang remaja yang berwajah hitam dengan senyumnya yang menarik, pandai menari serta merupakan pujaan setiap remaja. Dan menikah dengan Kray Purnamaningrum yang di anugrahi 8 Putra Putri dan 8 putra putri lainnya dengan pernikahan beliau dengan Kray Retnaningrum.

Sampai beliau memangku jabatan sebagai Wakil Gubernur bersama dengan Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan memperjuangkan kemerdekaan R.I pada seluruh dunia.

B. Pendidikan Sri Paku Alam VIII

Sebelum Sri Paku Alam VIII naik tahta dan di nobatkan sebagai Raja Pakualaman, beliau sempat menempuh pendidikan *Europesches Lagere School*, Yogyakarta, *Cristelijk MULO* Yogyakarta, *AMS B* Yogyakarta, *Rechts Hoogreschool* (sampai kandidat).

² Moedjanto, *Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman*, Yogyakarta: Kanisius 1994. hlm.99.

Dalam mental Health dikatakan bahwa, anak dalam perkembangannya menerima dua pengaruh pokok, transmisi kebudayaan dari nenek moyangnya, serta ilmu pengetahuan modern dari sekolah maupun pergaulan masa kini. Beliau juga di bekali dengan ilmu tradisi Pakualaman yang selalu dipertahankan mulai dari Paku Alam I sampai Paku Alam VIII.

C. Peran dan Jabatan Sri Paduka Paku Alam VIII

Sri Paku Alam VIII adalah seorang tokoh pejuang, beliau mempunyai peran dalam sejarah perjuangan Indonesia, khususnya di Yogyakarta. Pada masa perjuangan fisik kemerdekaan Indonesia nama beliau menonjol ketika bulan September 1945 bersama Sri Sultan Hamengkubuwono IX mendukung Proklamasi Kemerdekaan R.I dan menyatakan bahwa wilayah Kesultanan dan Kadipaten Pakualaman merupakan bagian integral dari wilayah R.I.

Pernyataan Sri Paku Alam VIII mempunyai arti yang penting sekali, karena kedua tokoh tersebut adalah Sultan dan Adipati dari wilayah Kasultanan dan Kadipaten Pakualaman merupakan teladan penduduk di wilayahnya. Kepemimpinan Dwi Tunggal Sri Sultan Hamengkubuwono dan Sri Paku Alam VIII dapat berjalan dengan baik dan penuh kewibawaan. Dua daerah Kasultanan dan Paku Alaman yang saat penjajahan sengaja di pisahkan dapat disatu padukan sebagai wilayah yang utuh yaitu dalam naungan wilayah Yogyakarta.

Peranan Sri Paku Alam VIII sangat besar, sejak Perjuangan kemerdekaan, pada saat Yogyakarta sebagai ibu kota R.I, pada saat Clash II

dan pada saat pembangunan. Beliau adalah seorang figur atau pribadi yang *sepi ing pamrih rame ing gawe*, seorang priyayi yang modern, aktif dalam organisasi olah raga dan kebudayaan. Beliau seorang pribadi yang pendiam, yang tekun dan sabar membawa propinsi Yogyakarta menjadi propinsi yang makmur.

Selama pergerakan nasional sampai Indonesia meraih kemerdekaan, kedua wilayah yaitu Kasultanan dan Pakualaman sangat harmonis. Mereka bekerjasama dan bahu membahu untuk menjalankan amanat rakyat untuk mensejahterakan rakyat Yogyakarta. Mereka juga dengan tekad bulat bergabung dengan RI tanpa ada keraguan sama sekali. Integralitas kedua pemimpin tersebut sering disebut Dwitunggal raja Yogyakarta. Mereka saling mengisi kekosongan yang menjadi kelemahan dari pasangannya. Kedua tokoh tersebut juga telah menjadikan Yogyakarta sebagai salah satu daerah yang sangat unik, khususnya dalam hal kepemimpinan dan pemerintahan.³

Setelah Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, KGPAA Paku Alam VIII mengeluarkan amanat yang berisi bahwa Kadipaten Paku Alaman yang bersifat kerajaan adalah Daerah Keistimewaan dari Negara Republik Indonesia. Antara tahun 1946-1949 Yogyakarta menjadi Ibu Kota RI dan waktu Belanda mulai mengadakan serangan ke Yogyakarta, Yogyakarta menjadi Daerah Gubernur Militer yang dipimpin oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paku Alam VIII. Kedua pimpinan Gubernur

³ Purwadi, *Perjuangan Kraton Yogyakarta : Jasa Sri Sultan Hamengkubuwono IX dalam Memakmurkan Rakyat*. Banten: Krakatau Perrs, 2003.hlm. 254-255.

Militer ini banyak mendorong usaha- usaha para Gerilyawan dalam mengusir Belanda.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan R.I, keberadaan Sri Paku Alam VIII sebagai salah satu Dwi tunggal pemimpin Formal dan sekaligus pemimpin Non-Formal. Peranan beliau sebagai pejuang, pengayom, pengayem dan sekaligus pepunden semua lapisan masyarakat. Dengan tampilan beliau yang selalu teliti, berwibawa, tenang, tidak terlalu banyak bicara membawa kesan berwibawa dan kharismatik.

Dalem Puro Pakualaman banyak dipakai tempat berlindung para Gerilyawan dan tentara dalam aksinya melawan Belanda, semasa pendudukan Belanda. Serangan Umum 1 Maret 1949, menjadi salah satu penarikan tentara Belanda dari Yogyakarta pada tanggal 29 Juni 1949 dan di susul Konperensi Meja Bundar di Negeri Belanda.

Penghargaan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Kadipaten Pakualaman sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta dari negara Republik Indonesia di balas dengan pemberian kontribusi Kadipaten Pakualaman bagi RI. Dalam mendedikasikan diri untuk kepentingan bangsa, Sri Paku Alam VIII dan Kadipaten Pakualaman lenih banyak mengambil peran sebagai fasilitator. Sedangkan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, seperti telah diuraikan, lebih banyak tampil sebagai *master mind* dan *desion maker*. Namun, posisi Paku Alam VIII sebagai *the Second* bukannya tidak penting. Dalam masa- masa sulit peran fasilitator sangat berarti selama masa revolusi fisik (1945-1949). Selama ibukota RI berada di Yogyakarta (sejak 14 Januari

1946), Puro Pakualaman pernah dipakai sebagai tempat tinggal sementara oleh Presiden sekeluarga. Paku Alam VIII dan Puro Pakualaman memberi bantuan akomodasi dan logistik bagi semua peserta konferensi TKR. Dalam konferensi itu itu dipilih beberapa pimpinan baru, yaitu Kolonel Sudirman (Pimpinan Tertinggi TKR), Letjend. Urip Sumoharjo (Kepala Staff Umum TKR), dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX (menteri pertahanan).

Seluruh pejabat TKR diberi bantuan berupa rumah- rumah dinas oleh Puro Pakualaman. Kepemimpinan dan keteladanan dwitunggal Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paku Alam VIII diuikuti segenap rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta. Segenap penduduk berjuang keras untuk mempertahankan RI. Pemerintah DIY memberikan catatan resmi mengenai pengorbanan resmi penduduk Yogyakarta selama perang Kemerdekaan (19 Desember 1948- 30 Juni 1949).⁴

Mengenai komitmen tinggi Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paku Alam VIII terhadap RI, sebenarnya tidak diragukan lagi. Sejarah memberikan banyak bukti loyalitas tanpa pamrih itu. Namun, mengenai sikap tegas Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paku Alam VIII mengenai DIY juga sangat jelas. Amanat 5 September 1945 yang mereka keluarkan jelas-jelas menunjukkan pendirian itu. Demikian juga dalam Amanat 30 Oktober 1945, mereka berdua menegaskan bahwa status DIY dan tidak perlunya

⁴ Hajar Pamadhi. *Loc. cit*,

kehadiran Komisaris Tiga yang merupakan utusan atau wakil Pemerintah Pusat tersebut.⁵

Dalam amanat tersebut dikatakan bahwa kekuasaan- kekuasaan yang dahulu dipegang oleh Pemerintah jajahan (dalam zaman Belanda dijalankan oleh gubernur dengan kantornya, dalam zaman Jepang oleh Koti Zimu Koku Tyokan dengan kantor nya) telah direbut oleh rakyat dan diserahkan kembali pada Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paku Alam VIII. Amanat tersebut menegaskan bahwa Paduka Tuan Komisaris Tinggi pada 22 Oktober 1945 di Kepatihan Yogyakarta di hadapan Sri Suktan Hamengkubuwono IX dan Sri Paku alam VIII dengan disaksikan oleh para pembesar dan para pemimpin telah menyatakan tidak perlunya akan adanya *Subcommissariat*⁶ dalam daerah Yogyakarta.

Setelah DIY ditegakan karena sikap tega Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paku Alam VIII dalam Amanat 5 september 1945 dan Amanat 30 Oktober 1945, kedua raja ini sekali lagi harus menyatakan ketegasannya untuk menyelematkan eksistensi DIY. Pada 1946, ternyata ada beberapa pemimpin di Yogyakarta yang sepertinya menghambat perkembangan DIY. Pada 13 Mei 1946 munculah sebuah konsep tentang Maklumat yang akan ditandatangani oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paku Alam VIII. Namun , dalam

⁵ Haryadi Baskoro dan Sudomo Sunaryo. *Catatan Perjalanan Keistimewaan Yogyakarta menurut Sejarah, Mencermati Perubahan, Mengagas Masa Depan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010. hlm.43.

⁶ Rini Yuniarti, *BPUPKI, PPKI, Proklamasi Kemerdekaan RI*, Jakarta: Kompas, 2003. hlm.38.

konsep itu hanya di tulis “ Daerah Yogyakarta” dan bukan “DIY”. Hal itu membuat Sri Sultan Maengkubuwono IX dan Sri Paku Alam VIII menunda penandatanganan meskipun bukan berarti tidak setuju dengan isinya.⁷

Baru setelah beberapa hari kemudian dibubuhkan tulisan “ DIY”, maka mereka berdua bersedia memberi tanda tangan pada tanggal 18 Mei 1946. Sri Paku Alam VIII yang menjadi Wakil Gubernur DIY yang pertama adalah seorang Raja yang sejak Kecil sudah bergaul dengan kehidupan di luar tembok keraton. Keberpihakannya kepada rakyat Yogyakarta banyak terlihat dari gaya bahasa nya yang halus kepada rakyat jelata. Bersama Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Sri Paku Alam VIII adalah pemimpin di Yogyakarta yang sangat besar perannya. Setelah Sri Sultan Hamengkubuwono IX wafat, sampai Sri Sultan Hamengkubuwono X menjadi Gubernur DIY, Sri Paku Alam VIII memimpin DIY sebagai pejabat Gubernur.⁸

Keistimewaan Yogyakarta yang di tandai dengan Kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paku Alam VIII pada dasarnya merupakan kesepakatan awal antara Yogyakarta dengan RI. Begitu RI merdeka, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paku Alam VIII menyatakan bergabung, sehingga kemudian Presiden Soekarno memberikan Piagam Kedudukan.

Pada 19 Agustus 1945 bersama Hamengkubuwono IX, Paku Alam VIII mengirimkan kawat (semacam sms namun bersifat resmi) kepada

⁷ Rini Yuniarti. *Op cit. hlm* 72

⁸ Moedjanto. *Loc. cit.*

Sukarno dan Hatta atas berdirinya RI dan terpilihnya kedua beliau sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Pada 5 September 1945 secara resmi KGPAA Paku Alam VIII mengeluarkan Amanat/Maklumat (semacam dekrit kerajaan) bergabungnya Kadipaten Pakualaman dengan Negara Republik Indonesia. Sejak saat itulah kerajaan terkecil pecahan Mataram ini menjadi daerah Istimewa. Melalui Amanat Bersama antara Hamengkubuwono IX dan Paku Alam VIII dan dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Daerah Yogyakarta pada 30 Oktober tahun yang sama, beliau berdua sepakat untuk menggabungkan Daerah Kasultanan dan Kadipaten dengan nama Daerah Istimewa Yogyakarta.⁹

Jabatan yang dipangku selanjutnya adalah Wakil Kepala Daerah Istimewa, Wakil Ketua Dewan Pertahanan DIY (Oktober 1946), Gubernur Militer DIY dengan pangkat Kolonel (1949 setelah agresi militer II). Mulai tahun 1946-1978 Paku Alam VIII sering menggantikan tugas sehari-hari Hamengkubuwono IX sebagai kepala daerah istimewa karena kesibukan Hamengkubuwono IX sebagai menteri dalam berbagai kabinet RI. Selain itu beliau juga menjadi Ketua Panitia Pemilihan Daerah DIY dalam pemilu tahun 1951, 1955, dan 1957; Anggota Konstituante (November 1956); Anggota MPRS (September 1960) dan terakhir adalah Anggota MPR RI masa bakti 1997-1999 Fraksi Utusan Daerah.

Setelah Hamengkubuwono IX mangkat di tahun 1988, Paku Alam VIII menggantikan sang mendiang menjadi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

⁹ Soedarisman Poerwokoesomo, *Kadipaten Pakualaman*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press 1985, hlm 72.

sampai akhir hayat beliau di tahun 1998. Perlu ditambahkan bahwa pada 20 Mei 1998 beliau bersama Hamengkubuwono X mengeluarkan Maklumat untuk mendukung Reformasi Damai untuk Indonesia. Maklumat tersebut dibacakan di hadapan masyarakat dalam acara yang disebut Pisowanan Agung. Beberapa bulan setelahnya beliau menderita sakit dan meninggal pada tahun yang sama. Sri Paduka Paku Alam VIII tercatat sebagai wakil Gubernur terlama (1945-1998) dan Pelaksana Tugas Gubernur terlama (1988-1998) serta Pangeran Paku Alaman terlama (1937-1998)

Dengan adanya keputusan yang jelas antara Yogyakarta dan pemerintahan pusat, maka Sri Sultan dan Sri Paku Alam VIII berani melangkah tegas dan nyata untuk mendukung kemerdekaan RI dan berjuang habis-habisan untuk RI. Mereka berdua benar-benar melakukan apa yang ditugaskan oleh Presiden RI sebagaimana tertulis dalam Piagam Kedudukan itu, yaitu mencurahkan segala pikiran, tenaga, jiwa, dan raga untuk keselamatan Yogyakarta sebagai bagian dari RI.¹⁰

Setelah piagam itu sampai di Yogyakarta pada 6 September 1945, segenap masyarakat Yogyakarta bergerak untuk menguasai Yogyakarta sepenuhnya bagi RI. Sehubungan dengan Piagam Kedudukan yang diberikan oleh Presiden RI kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Amanat 5 September 1945 yang dikeluarkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX ,

¹⁰ Haryadi Baskoro, *Catatan Perjalanan Keistimewaan Yogyakarta menurut Sejarah mencermati Perubahan, mengagas Masa Depan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 28.

segenap pegawai Kasultanan menyatakan komitmen untuk mendukung Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan kemerdekaan RI.

Demikian juga segenap pegawai(abdi dalem) Kadipaten Pakualaman, menyatakan mosi yang berisi komitmen untuk mendukung RI. Mosi yang dibuat pada 13 Oktober 1945 itu berisi pernyataan dan keputusan. Pernyataan yang di sampaikan adalah “ pertama, bahwa dengan berdirinya negara Republik Indonesia”Merdeka”akan memberi keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada masyarakat umumnya. Kedua, bahwa dengan kembalinya Pemerintah Belanda, berarti penjajahan yang akan membawa penindasan kesengsaraan penduduk Indonesia. Ketiga, bahwa sekarang makin nyata gentingnya suasana, yang dibuktikan oleh kejadian- kejadian yang sangat menghina negara Republik Indonesia. Keempat, bahwa Praja Pakualaman telah diakui oleh P.J.M Presiden RI, sebagai Daerah Istimewa, yang mendapat kepercayaan sepenuhnya dari P.J.M Presiden RI.¹¹

Dengan dasar keempat pernyataan itu, maka diputuskan, pertama, bahwa Abdi Dalem Praja Pakualaman harus teguh bersatu padu dalam lingkungan Negara Republik Indonesia Merdeka, tetap mencurahkan segala tenaga, jiwa, dan raga membela Indonesia Merdeka. Kedua, tetap setia dan berdiri dibelakang Sri Paduka Ngarsa Dalem Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Paku Alam VIII yang telah mendapat penuh kepercayaan dari P.J.M Presiden RI. Ketiga, serentak meletakkan jabatannya, jika bangsa lain memrintah Indonesia.

¹¹ Haryadi Baskoro.*Op.cit.*hlm 28.

Jelas sekali bahwa kedua mosi diatas menunjukkan bagaimana komitmen total Kasultanan dan Pakualaman kepada RI. Mereka menunjukkan sikap militan yang tanpa kompromi untuk hanya mendukung RI dan melawan setiap penjajah dari bangsa lain. Satu hal yang harus dicatat adalah, komitmen total kepada RI itu diberikan sebagai respon atas sikap tegas Pemerintah Pusat tentang status Daerah Istimewa Yogyakarta(daerah istimewa dari Republik Indonesia).

Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paku Alam VIII beserta segenap rakyat Yogyakarta bukan hanya menyatakan bergabung dengan RI, namun juga berjuang secara nyata untuk tegaknya bangsa Indonesia.

Kondisi yang berbeda dengan Yogyakarta, Kasultanan dan Pakualaman telah mengalami reunifikasi sebelum terjadi Kemerdekaan RI. Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paku Alam VIII tampil sebagai Dwitunggal pemimpin yang sangat karismatik.¹² Segenap rakyat Yogyakarta memberi dukungan penuh kepada kepemimpinan mereka berdua. Masyarakat Yogya pada masa- masa itu jauh lebih kondusif untuk mendukung terbentuknya DIY.

Kadipaten Paku Alaman adalah negara dependen yang berbentuk kerajaan. Kedaulatan dan kekuasaan pemerintahan negara diatur dan dilaksanakan menurut perjanjian/kontrak politik yang dibuat oleh negara induk bersama-sama negara dependen. Sebagai konsekuensi dari bentuk negara kesatuan yang dipilih oleh Republik Indonesia sebagai negara induk,

¹² Wawancara dengan Drs. Tamdaru Tjokrowerdoyo pada tanggal 11 September 2011

maka pada tahun 1950 status negara dependen Kadipaten Pakualaman (bersama-sama dengan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat) diturunkan menjadi daerah istimewa setingkat provinsi dengan nama Daerah Istimewa Yogyakarta.¹³

Sebagai peninggalan sejarah bernilai tinggi yang perlu dilestarikan agar generasi yang akan datang dapat menikmatinya, Puro Paku Alaman memiliki corak yang khas dan merupakan corak kebudayaan Jawa. Puro Paku Alaman patut disebut sebagai adikarya budaya para leluhur. Bangunan yang didirikan sejak 17 Maret 1813 memiliki tata nilai teknologi dan seni yang tinggi. Paku Alaman memiliki gaya arsitektur khas, kayu-kayu yang diukir dengan ornamen indah yang simbolik, ornamen-ornamen yang berakar dari kebudayaan tradisional.

Status Paku Alaman berganti-ganti seiring dengan perjalanan waktu. Pada 1813-1816 merupakan negara dependen dibawah Pemerintah Kerajaan Inggris India Timur (East Indian). Selanjutnya tahun 1816-1942 merupakan negara dependen Kerajaan Nederland, dengan status *Zelfbestuurende Landschappen Hindia Belanda*. Dari 1942 sampai 1945 merupakan bagian dari Kekaisaran Jepang dengan status Kooti dibawah pengawasan Penguasa Militer Tentara XVI Angkatan Darat.

Mulai tahun 1945 Negeri kecil ini bergabung dan menjadi daerah Indonesia. Kemudian dengan Kasultanan Yogyakarta membentuk

¹³Silmi Albiladiyah, *Puro Pakualaman Selayang Pandang*. Yogyakarta: Badan Kepariwisataaan 1984. hlm.67

pemerintahan bersama sampai tahun 1950 saat secara resmi keduanya dijadikan sebuah daerah istimewa bukan lagi sebagai sebuah negara

Puro Paku Alaman juga memiliki sejarah tersendiri bagi Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ario (KGPAA) Paku Alam VIII, yang lahir pada Minggu Pon 29 Mulud atau bersamaan dengan 10 April 1910 dengan nama sebagai BRM Haryo Sularso Kunto Suratno. Kemudian berganti nama KPH Suryodilogo., beliau menamatkan pendidikan *Europesches Lagere School* Yogyakarta, *Christelijk MULO* Yogyakarta, *AMS B* Yogyakarta, dan *Rechts Hoogeschool*.¹⁴

Sejarah perjuangan Nasional Yogyakarta menempati posisi terhormat, posisi istimewa. Sejak proklamasi sampai dengan pengakuan dan penyerahan kedaulatan negara RI, kota Yogyakarta menjadi Ibu Kota Perjuangan RI. Serangan umum 1 maret 1949 merupakan saat penentuan, baik didalam maupun luar negeri. Di luar negeri, dunia yakin bahwa negara RI masih hidup sedangkan di dalam negeri timbul kesadaran baru, bahwa perjuangan diplomasi perlu didukung perjuangan militer.

Setelah Ibu Kota RI pindah dan menetap di Jakarta, Yogyakarta membangun dirinya menjadi kota pelajar dan mahasiswa sampai pada waktu-waktu tertentu Yogyakarta menjadi kiblat Pendidikan Se-Indonesia. Bersama dengan arus besar proses pembangunan Indonesia, Yogyakarta tetap memainkan kodratnya sebagai wadah peristiwa-peristiwa besar. Komando Trikora 1963 dicanangkan dari alun-alun utara Yogyakarta. Tuntutan

¹⁴ Soedarisman Poerwokoesome, *Kadipaten Pakualaman*. Yogyakarta: Balai Pustaka 1985, hlm.273.

dibubarkannya PKI yang sudah dua kali memberontak RI menggelegar dari alun-alun utara.

Sejarah adalah rangkaian kejadian, pelaku-pelakunya dalam kurung waktu dan dalam situasi dan kondisi sesaat, sebagai sebab akibat yang semuanya ada hikmahnya. Sri Paduka KGPAA Paku Alam VIII adalah tokoh besar Yogyakarta. Beliau orang kedua disamping almarhum Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Sri Paku Alam VIII adalah pelaku sejarah, karena beliau adalah nara sumber utama tentang Yogyakarta, utama dikalangan Pemerintah Daerah.

Bersama Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Paku Alam VIII mendukung eksistensi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bergabung didalamnya dengan mengirim kawat pada Presiden Soekarno pada tanggal 19 Agustus 1945. Tanggal 5 September 1945, Paku Alam VIII mengeluarkan Maklumat bergabungnya Kadipaten Pakualaman dengan Negara Republik Indonesia. Sejak saat itu, Kadipaten Pakualaman bersama dengan Kraton Kasultanan Yogyakarta dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Daerah Yogyakarta pada tanggal 30 Oktober 1945, menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta.¹⁵

Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, beliau memangku jabatan Wakil Gubernur/Kepala DIY. Setelah Sri Sultan Hamengkubuwono IX mangkat di tahun 1988, beliau mengganti sebagai Pejabat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta(1988-1989). Peran Paku Alam VIII dalam persiapan

¹⁵ Hajar Pamadhi, dkk, *Bunga Mawar Dan Melati dari Puro Pakualaman*. Yogyakarta: Tri Tunggal Buana Dewi, 2010, hlm.19.

kemerdekaan, perjuangan Kemerdekaan maupun dalam mengisi Kemerdekaan Republik Indonesia tidak diragukan lagi. Paku Alam VIII ikut merancang strategi perang melawan tentara Belanda II, beberapa kalangan banyak yang belum mengerti bahwa pada saat perpindahan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Yogyakarta peran beliau sangat kuat.

Pada tanggal 11 September 1998 *Jumat Wage 11 Jumadilawal 1931* , Paku Alam VIII wafat pada usia 88 tahun perhitungan Masehi atau 91 perhitungan Jawa. Beliau meninggal sekitar pukul 17.15, setelah dirawat selama 24 hari di RSUD Dr.Sardjito. Dengan kurun waktu 51 tahun Beliau telah menduduki tahtanya. Suatu prestasi dan rekor dalam lamanya menduduki tahta dalam dinasti Paku Alaman, juga kualitas dalam kepemimpinannya, baik sebagai Raja maupun sebagai Kepala Daerah yang dengan kebijakan dan penyesuaian diri dengan pertanda zaman, telah membawa rakyat dengan selamat dan terhormat melalui gejolak tiga zaman: zaman Belanda, zaman Jepang, dan zaman Republik (baik era Soekarno, Soeharto maupun Reformasi).¹⁶

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah provinsi tertua kedua di Indonesia setelah Jawa Timur, yang dibentuk oleh pemerintah negara bagian Indonesia. Provinsi ini juga memiliki status istimewa atau otonomi khusus. Status ini merupakan sebuah warisan dari zaman sebelum kemerdekaan. Kesultanan Yogyakarta dan juga Kadipaten Paku Alaman, sebagai cikal bakal

¹⁶.Sulityo Hartanto, *Sri Paduka KGPAA Paku Alam VIII*.Yogyakarta: Yayasan Idayu 1999, hlm.26.

atau asal usul DIY, memiliki status sebagai “Kerajaan vasal/Negara bagian/Dependent state”¹⁷ dalam pemerintahan penjajahan mulai dari VOC , Hindia Perancis (Republik Batavia Belanda-Perancis), India Timur/EIC (Kerajaan Inggris), Hindia Belanda (Kerajaan Nederland), dan terakhir Tentara Angkatan Darat XVI Jepang (Kekaisaran Jepang). Oleh Belanda status tersebut disebut sebagai *Zelfbestuurende Landschappen* dan oleh Jepang disebut dengan *Koti/Kooti*.

Status ini membawa konsekuensi hukum dan politik berupa kewenangan untuk mengatur dan mengurus wilayah negaranya sendiri di bawah pengawasan pemerintah penjajahan tentunya. Status ini pula yang kemudian juga diakui dan diberi payung hukum oleh Bapak Pendiri Bangsa Indonesia Soekarno yang duduk dalam BPUPKI dan PPKI sebagai sebuah daerah bukan lagi sebagai sebuah negara.

Pada saat reformasi, tanggal 20 Mei 1998, sehari sebelum pengunduran diri presiden terdahulu (former president) Presiden Soeharto, Sultan HB X bersama-sama dengan Sri Paduka Paku Alam VIII mengeluarkan sebuah maklumat yang pada pokoknya berisi "ajakan kepada masyarakat untuk mendukung gerakan reformasi damai, mengajak ABRI (TNI/Polri) untuk melindungi rakyat dan gerakan reformasi, untuk menjaga persatuan dan kesatuan, dan mengajak masyarakat untuk berdoa bagi Negara dan Bangsa". Maklumat tersebut dibacakan di hadapan masyarakat dalam acara yang disebut *Pisowanan Agung*.

¹⁷. Negara Vasal adalah daerah yang terikat oleh 2 negara, bisa dilihat di kamus besar indonesia di <http://www.kamusbesar.com>

Beberapa bulan setelahnya beliau menderita sakit dan meninggal pada 11 September 1998. Sri Paduka Paku Alam VIII tercatat sebagai wakil Gubernur terlama (1945-1998) dan Pelaksana Tugas Gubernur terlama (1988-1998) serta Paku Alam VIII terlama (1937-1998).